

**PENDIDIKAN POLITIK GERAKAN MAHASISWA DALAM MENCIPTAKAN KADER
MUSLIM NEGARAWAN
(STUDI KASUS DI KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA (KAMMI)
DAERAH SLEMAN PERIODE 2013-2014)**

**Rakhyan Risnu Sasongko dan Dr. Nasiwan, M.Si./Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum
Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Negeri Yogyakarta**

risnu.rakhyan@gmail.com

ABSTRAK

Pendidikan politik adalah proses penyadaran dan pendewasaan politik para anggota masyarakat yang diharapkan senantiasa “melek politik”. Pendidikan politik sangat penting diberikan bagi generasi penerus bangsa dan pemerintah wajib memfasilitasinya. Salah satu sarana pelaksana pendidikan politik bagi mahasiswa adalah organisasi KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep pendidikan politik yang dilaksanakan KAMMI untuk menciptakan kader yang berorientasi pada profil muslim negarawan, beserta hambatan dalam pelaksanaannya.

Subjek penelitian ini adalah pengurus KAMMI Daerah Sleman yang terdiri dari: (1) Ketua umum; (2) Sekretaris; (3) Bendahara; (4) Ketua Bidang; (5) Bidang Kaderisasi; dan (6) Bidang Kebijakan Publik. Objek penelitian ini berupa konsep pendidikan politik, pelaksanaan pendidikan politik, dan hambatan dalam pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan KAMMI dalam menciptakan kader muslim negarawan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif terdiri atas tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik ini digunakan sebagai acuan penulisan hasil penelitian untuk mempermudah dalam memahami deskripsi yang disajikan sebagai hasil akhir dari penelitian sehingga dapat memberikan pemahaman yang semestinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Konsep pendidikan politik KAMMI merupakan satu langkah awal yang dilaksanakan oleh gerakan Islam kepada para aktivis dakwah, agar mereka memiliki kesiapan untuk terjun dalam kelembagaan politik. Pendidikan politik KAMMI dilatar belakangi dari konsep *syumuliatul Islam* atau konsep kesempurnaan Islam. (2) Program yang dilaksanakan KAMMI sebagai sarana pendidikan politik mahasiswa, yaitu melalui *daurah marhalah*, *daurah siyasi*, dan aksi KAMMI. Bidang yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pendidikan politik adalah bidang kaderisasi dan kebijakan publik. (3) Faktor yang menghambat KAMMI dalam pelaksanaan pendidikan politik bagi mahasiswa terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi sumber dana dan terjadinya benturan waktu pelaksanaan kegiatan antara organisasi intrakampus dan ekstrakampus. Faktor eksternal yang menjadi hambatan adalah kurangnya kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya pendidikan politik dan sikap pragmatis mahasiswa.

Kata Kunci: *Pendidikan, Politik, Gerakan, Mahasiswa*

**POLITICAL EDUCATION STUDENT MOVEMENT IN CREATING MUSLIM STATESMAN
CADRE
(CASE STUDY IN KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA (KAMMI)
REGIONAL SLEMAN PERIOD 2013-2014)**

**Rakhyan Risnu Sasongko and Dr. Nasiwan, M.Si./Citizenship and Law Education,
Faculty of Social Sciences,
Yogyakarta State University**

risnu.rakhyan@gmail.com

ABSTRACT

Political education is the awareness and political maturation of the community members are expected to become "melek politik". Political education is essential given to the next generation and the government must facilitate it. One means of implementing political education for students is an organization KAMMI (Indonesian Muslim Student Action Union). The purpose of this study is to determine the concept of political education that conducted by KAMMI to create a cadre with Muslim statesman oriented, along with the obstacles in its implementation.

The subject of the study is KAMMI Regional Sleman consisting of: (1) Chairman; (2) Secretary; (3) Treasurer; (4) The head of the Division; (5) Regeneration and Human Resource Division; and (6) Public Policy Division. The object of this research is the concept of political education, the implementation of political education, and obstacles in the implementation of political education conducted by KAMMI in creating a Muslim statesman cadre. Data collection technique used observation, documentation and interview. Data analysis technique used is descriptive qualitative analysis consists of three steps of activities that take place simultaneously: data reduction, data presentation and conclusion. These techniques are used as a reference to facilitate the writing of the results of research in understanding the description which is presented as the final results of the research to give a proper understanding.

The results showed that (1) the concept of political education in KAMMI represents the initial steps undertaken by the Islamic movement to the Muslim activist, so that they have the readiness to engage in political institutions. KAMMI's political education background is taken from the concept of *syumuliatul Islam* or the perfection of Islam. (2) KAMMI's programs as a means of political education of students are *Daurah Marhalah*, *Daurah siyasi* and *aksi KAMMI*. The divisions that have responsibility in the implementation of political education are Regeneration and Human Resource Division and Public Policy Division. (3) Factors that inhibit KAMMI in the implementation of political education for students consist of internal and external factors. Internal factors include the source of funds and conflict of timing of activities between the organizations with external campus activities and internal campus activities. External factors are the obstacles are the lack of student awareness of the importance of political education and pragmatic attitude of students.

Keywords: Education, Politics, Movement, Students

PENDAHULUAN

Dewasa ini publik sering disuguhi tontonan “sandiwara politik” yang dimainkan oleh para elit politik. Melalui berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik, para pelaku politik atau yang lazim disebut politisi atau politikus acapkali mendemonstrasikan perilaku politik yang kurang terpuji menurut takaran moralitas publik. Sebut saja mulai kasus korupsi, skandal seksual, kebohongan publik, pencitraan untuk menutupi kelemahan dan kesalahan dan perilaku lain yang intinya mengecewakan rakyat. Terutama masalah korupsi yang mendera para politisi, baik di level nasional maupun di daerah, selain merugikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), juga membuat rakyat makin apatis. Muaranya tentu pada pengurangan hak-hak rakyat dan kesejahteraan masyarakat yang makin terusik.

Kondisi ini tidak sejalan dengan tujuan dari sistem politik seperti yang disampaikan oleh Samuel P. Huntington. Menurut Huntington pengertian sistem politik yang dibedakan dalam beberapa cara pandang dengan memiliki lima komponen berbeda, salah satunya adalah kebijakan. Huntington menjelaskan bahwa kebijakan adalah pola-pola kegiatan pemerintah yang secara sadar terbentuk untuk mempengaruhi distribusi keuntungan dalam masyarakat (Listyarti dan Retno 2015: 1). Sehingga dengan terjadinya pengurangan hak dan kesejahteraan masyarakat, distribusi keuntungan yang menjadi tujuan dari sistem politik ini tidak tercapai.

Banyak faktor yang menjadi penyebab maraknya berbagai kasus korupsi yang melibatkan para politikus itu. Mulai dari faktor ekonomi, logika materialisme, perilaku hedonis, sikap pragmatis, gagap dengan kekuasaan dan lain sebagainya. Namun faktor mentalitas dan moralitas mereka yang mendominasi perbuatan menyimpang tersebut. Dan faktor demoralisasi politisi ini salah satunya adalah makin menjauh dari nilai-nilai Pancasila yang menjadi pandangan hidup bangsa. Pancasila seharusnya menjadi dasar dan pijakan bagi para pelaku politik di negeri ini. Jikalau mengabaikan Pancasila sebagai sumber inspirasi dalam bertindak dan bersikap, tentu yang didapat adalah fenomena yang mengecewakan publik. Karena Pancasila tidak lagi menjadi jati diri dan kepribadiannya dalam melakukan aktifitas politik.

Salah satu diantara pendidikan yang harus diberikan bagi warga negara agar mampu merealisasikan tujuan sistem politik adalah pendidikan politik. Kartono (1989: 14) menjelaskan bahwa pendidikan politik merupakan bagian dari pendidikan orang dewasa. Pendidikan politik dilakukan secara sengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis atau moril dalam mencapai tujuan-tujuan politik. Sedangkan Ruslan (Handoyo, 2010: 9) memaknai pendidikan politik sebagai berikut:

Upaya-upaya yang dicurahkan oleh lembaga-lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal, yang berusaha membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik yang sejalan dengan kultur politik orang-orang yang bergerak di lembaga-lembaga tersebut pada setiap warga negara, membentuk dan menumbuhkan kesadaran politik dengan segala tingkatannya, membentuk dan menumbuhkan kemampuan partisipasi politik secara aktif, dalam ikut memecahkan persoalan-persoalan umum masyarakatnya dengan segala bentuk partisipasi yang memungkinkan dan mengantarkan kepada perubahan menuju yang lebih baik.

Pendidikan politik sangat penting diberikan bagi generasi penerus bangsa. Seperti yang dikemukakan oleh Kartono (1989: 19) tujuan dari diadakannya pendidikan politik yaitu, untuk mempersiapkan (1) kader-kader politik yang mampu berfungsi dalam pertarungan politik, (2) untuk mendapatkan penyelesaian politik sesuai dengan konsep politik yang telah ditetapkan. Pendidikan politik merupakan proses mempengaruhi individu agar mendapatkan informasi, wawasan, dan keterampilan politik, sehingga sanggup bersikap kritis, dan lebih intensional terarah hidupnya.

Keberadaan gerakan mahasiswa dalam konstelasi sosial politik di negeri ini tak bisa dipandang sebelah mata. Diakui atau tidak, keberadaan mereka menjadi salah satu kekuatan yang selalu dipertimbangkan oleh berbagai kelompok kepentingan (*interest group*) terutama pengambil kebijakan, yakni negara. Diantara elemen-elemen gerakan mahasiswa yang memiliki pengaruh signifikan menurut Imam Cahyono (2003: 1), adalah gerakan mahasiswa Islam. Mereka adalah Organisasi Massa (Ormas) mahasiswa yang memiliki basis konstituen yang jelas dan massa pendukung yang besar seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Dipo, HMI MPO, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Pada langkah selanjutnya, pendidikan informal ini lebih digandrungi oleh para kaum intelektualis dikarenakan adanya kejelasan arah dan tujuan yang bersifat progresif yang memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan kepribadian baik secara personal (keshalihan individu) maupun secara komunal (keshalihan sosial). Hal itu tidak terlepas dari pola (sistem) kaderisasi dalam elemen gerakan mahasiswa (EGM) tersebut yang

secara teoritik mampu menjadikan semangat (spirit) bagi mereka untuk berkomitmen dengan pendidikan Islam dalam EGM tersebut.

Salah satu EGM yang memiliki konsentrasi dalam pengembangan pendidikan Islam informal tersebut adalah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia selanjutnya disingkat KAMMI, yang merupakan EGM yang didirikan pada tanggal 29 April 1998 (Andi Rahmat dan Mukhamad Najib, 2007: 45). KAMMI yang dilahirkan oleh para aktivis Lembaga Dakwah Kampus (LDK) memiliki corak pergerakan yang khas. Jaringan mereka sangat luas dan telah ada hampir di seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia. Tidak mengherankan jika pada usia yang masih muda KAMMI diakui banyak kalangan sebagai ormas mahasiswa Islam tersolid saat ini. Kehadiran massa dalam jumlah besar di setiap aksinya, memperkuat daya tekan KAMMI dalam mendukung gerakan reformasi (Imam Cahyono, 2003: 7). Awalnya KAMMI adalah jaringan aksi namun pada perkembangannya bermetamorfosis menjadi Organisasi Massa kemahasiswaan.

KAMMI sebagai organisasi ekstra kampus menjadi salah satu sarana pendidikan politik bagi mahasiswa. KAMMI memiliki visi "sebagai wadah perjuangan permanen yang akan melahirkan kader-kader pemimpin dalam upaya mewujudkan bangsa dan negara Indonesia yang Islami". Politik yang dianut oleh KAMMI adalah politik yang sesuai dengan syariah Islam. Menurut Sudarsono (2010: 60), bagi KAMMI politik (*siyasah*) tidak akan lepas dari dakwah. Antara politik dan dakwah akan selalu bergandengan. Dalam kaitannya dengan dakwah, *siyasah* adalah sebagai alat (*wasilah*). Makna dakwah secara bahasa adalah *'an tumilasy-syai-a ilaikan* (usaha mencenderungkan, mencondongkan atau menarik sesuatu kepadamu), sedangkan *siyasah* adalah *al-qiyamu 'alasy-syai-i bima yushlihu* (menangani sesuatu dengan cara-cara yang memperbaiki sesuatu itu).

Cahyadi Takariawan (2008: 91) menjelaskan pendidikan politik (*at-tarbiyah as-siyasiyyah*) yang dilaksanakan oleh KAMMI merupakan satu langkah awal yang harus dilaksanakan oleh gerakan Islam kepada para aktivis dakwah, agar mereka memiliki kesiapan untuk terjun dalam kelembagaan politik. Oleh karena itu, sebelum terjun di dunia politik, aktivis dakwah dipersiapkan secara rutin dan berkesinambungan dalam program *tarbiyah siyasiyyah* (pendidikan politik). Pendidikan politik tersebut dilakukan dalam berbagai bentuk, diantaranya *daurah marhalah* (pelatihan kepemimpinan), *daurah siyasi*, dan madrasah KAMMI.

Pola kaderisasi KAMMI cukup berbeda dengan EGM-EGM lain yang kebanyakan lebih mengedepankan aspek nalar kritis, intelektual dan moralitas yang bersifat konseptual-teoritik saja. Semua bentuk kegiatan kaderisasinya disusun dengan semangat integralistik untuk mengupayakan lahirnya kader-kader berkualitas yang mampu mewujudkan tujuan organisasi. Dalam risalah *manhaj* kaderisasi 1427 H yang dirumuskan oleh Tim Kaderisasi KAMMI Pusat, poin penting yang menjadi titik tekan, yaitu KAMMI mampu menciptakan kader yang berorientasi pada profil muslim negarawan. Profil muslim negarawan dalam definisi risalah tersebut adalah kader KAMMI yang memiliki (1) basis ideologi Islam yang mengakar, (2) basis pengetahuan dan pemikiran yang mapan, (3) idealis dan konsisten, (4) berkontribusi pada pemecahan problematika umat dan bangsa, serta (5) mampu menjadi perekat komponen bangsa pada upaya perbaikan (Amin Sudarsono, 2008: 81).

Hal inilah yang kemudian menjadi tujuan dari KAMMI yaitu mencetak seorang kader muslim negarawan. Untuk mewujudkannya, sebagai *harakatut tajnid* KAMMI merumuskan jenjang kaderisasi KAMMI menjadi tiga lapis. Jenjang yang pertama dalam paling dasar adalah *sakhsiyah islamiyah* kemudian *sakhsiyah da'iyah muharikah* dan yang paling tinggi adalah *sakhsiyah qiyadah siyasiyah* (Tim Kaderisasi KAMMI, 2011: 22). Dengan pola yang demikian, diharapkan seluruh prasyarat-prasyarat yang harus didapatkan seorang kader hingga terwujud profil muslim negarawan dapat dicapai. Melihat hal ini sebagai kebutuhan untuk menciptakan seorang negarawan, maka pendidikan politik terhadap kader-kader KAMMI menjadi penting.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan model deskriptif. Penelitian dilaksanakan di KAMMI Daerah Sleman tepatnya di Karangmalang Blok B Nomor 19A Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos 55283. KAMMI Daerah Sleman membawahi enam komisariat, yakni KAMMI Komisariat UGM, UNY, AMIKOM, UPN, UII, dan Instiper.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan 2 sumber data, yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara terhadap pengurus KAMMI Daerah Sleman yang terdiri dari: (1) Ketua umum; (2) Sekretaris; (3) Bendahara (4) Ketua Bidang; (5) Bidang Kaderisasi; dan (6) Bidang Kebijakan Publik. Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan yakni buku-buku tentang pendidikan politik, buku tentang KAMMI, Risalah Manhaj Kaderisasi KAMMI 1427, Manhaj Kaderisasi KAMMI 1433, dan foto-foto kegiatan pendidikan politik KAMMI.

Peneliti dalam melakukan penelitian ini mengumpulkan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data diterapkan dalam rangka membuktikan kebenaran temuan hasil penelitian dengan

kenyataan di lapangan. Menurut Lincoln dan Guba (Moeleong 2010: 324), untuk memeriksa keabsahan data pada penelitian kualitatif antara lain dengan digunakan taraf kepercayaan data (*creadibility*). Teknik yang digunakan untuk melacak *creadibility* dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi (*triangulation*). Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

Analisis data yang menggunakan teknik analisis data model interaktif dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Data Penelitian

KAMMI Daerah Sleman membawahi enam komisariat, yaitu UGM, UNY, UII, UPN, AMIKOM, INSTIPER. KAMMI Daerah Sleman telah berdiri sejak tahun 2010 dan telah berganti kepemimpinan selama lima kali. Secara administratif sekretariat KAMMI Daerah Sleman masuk di Kecamatan Depok atau lebih tepatnya Karangmalang Blok B Nomor 19A Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos 55283. Lokasi yang cukup strategis karena mudah diakses dan cukup dekat dengan kampus-kampus yang berada di Kabupaten Sleman khususnya UNY dan UGM.

KAMMI adalah gerakan mahasiswa yang berasaskan Islam yang bersifat terbuka dan independen. Sebagai sebuah gerakan mahasiswa, KAMMI memiliki visi yaitu sebagai wadah perjuangan permanen yang akan melahirkan kader-kader pemimpin dalam upaya mewujudkan bangsa dan Negara Indonesia yang Islami. Sedangkan untuk misinya yaitu, (1) Membina keislaman, keimanan, dan ketakwaan mahasiswa muslim Indonesia. (2) Menggali, mengembangkan, dan memantapkan potensi dakwah, intelektual, sosial, politik, dan kemandirian ekonomi mahasiswa. (3) Memelopori dan memelihara komunikasi, solidaritas, dan kerjasama mahasiswa Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara. (4) Mencerahkan dan meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang rabbani, madani, adil, dan sejahtera. (5) Mengembangkan kerjasama antar elemen bangsa dan negara dengan semangat. (5) Membawa kebaikan, menyebar manfaat, dan mencegah kemungkaran (*amar ma'ruf nahi munkar*).

Tidak hanya visi dan misi saja, KAMMI juga memiliki sebuah credo gerakan. Credo gerakan KAMMI berisikan enam tuntunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kami adalah orang-orang yang berpikir dan berkendak merdeka. Tidak ada satu orang pun yang bias memaksa kami bertindak. Kami hanya bertindak atas dasar pemahaman, bukan taklid, serta atas dasar keikhlasan, bukan mencari pujian atau kedudukan.
- b. Kami adalah orang-orang pemberani. Hanyalah Allah yang kami takuti. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menggentarkan hati kami, atau membuat kami tertunduk apalagi takluk kepadanya. Tiada yang kami takuti, kecuali ketakutan kepada-Nya.
- c. Kami adalah para petarung sejati. Atas nama *al-haq* kami bertempur, sampai tidak ada lagi fitnah dimuka bumi ini. Kami bukan golongan orang yang melarikan diri dari medan pertempuran atau orang-orang yang enggan pergi berjihad. Kami akan memenangkan setiap pertarungan dengan menegakkan prinsip-prinsip Islam.
- d. Kami adalah penghitung risiko yang cermat, tetapi kami bukanlah orang-orang yang takut mengambil risiko. Syahid adalah kemuliaan dan cita-cita tertinggi kami. Kami adalah paraperindu surga. Kami akan menyebarkan aromanya didalam kehidupan keseharian kami kepada suasana lingkungan kami. Hari-hari kami senantiasa dihiasi dengan tilawah, dzikir, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran, diskusi-diskusi yang bermanfaat dan jauh dari kesia-siaan, serta kerja-kerja yang konkret bagi perbaikan masyarakat. Kami adalah putra-putri kandung dakwah, akan beredar bersama dakwah ini kemana pun perginya, menjadi pembangunnya yang paling tekun, menjadi penyebarannya yang paling agresif, serta penegaknya yang paling kokoh.
- e. Kami adalah orang-orang yang senantiasa menyiapkan diri untuk masa depan Islam. Kami bukanlah orang yang suka berleha-leha, minimalis dan loyo. Kami senantiasa bertebaran didalam kehidupan, melakukan eksperimen yang terencana, dan kami adalah orang-orang progressif yang bebas dari kejumudan, karena kami memandang bahwa kehidupan ini adalah tempat untuk belajar, agar kami dan para penerus kami menjadi perebut kemenangan yang hanya akan kami persembahkan untuk Islam.
- f. Kami adalah ilmuwan yang tajam analisisnya, pemuda yang kritis terhadap kebatilan, politisi yang piawai mengalahkan musuh dan yang piawai dalam memperjuangkan kepentingan umat, seorang pejuang di siang hari dan rahib di malam hari, pemimpin yang bermoral, teguh pada prinsip dan mampu mentransformasikan masyarakat, guru yang mampu memberikan kephahaman dan teladan, sahabat yang tulus

dan penuh kasih sayang, relawan yang mampu memecahkan masalah sosial, warga yang ramah kepada masyarakatnya dan responsif terhadap masalah mereka, manajer yang efektif dan efisien, panglima yang gagah berani dan pintar bersiasat, prajurit yang setia, diplomat yang terampil berdialog, piawai berwacana, luas pergaulannya, percaya diri yang tinggi, semangat yang berkobar tinggi.

Selain credo, KAMMI juga memiliki enam prinsip gerakan yaitu (1) Kemenangan Islam adalah jiwa perjuangan KAMMI, (2) Kebathilan adalah musuh abadi KAMMI, (3) Solusi Islam adalah tawaran perjuangan KAMMI, (4) Perbaikan adalah tradisi perjuangan KAMMI, (5) Kepemimpinan umat adalah strategi perjuangan KAMMI, dan (6) Persaudaraan adalah watak *muamalah* KAMMI. Sedangkan karakter organisasi KAMMI adalah organisasi Pengkaderan (*harakatut tajnid*) dan organisasi pergerakan (*harakatulamal*).

Selanjutnya KAMMI juga memiliki paradigma gerakan KAMMI, yaitu:

- a. KAMMI adalah Gerakan Dakwah Tauhid
 - 1) Gerakan Dakwah Tauhid adalah gerakan pembebasan manusia dari berbagai bentuk penghambaan terhadap materi, nalar, sesama manusia dan lainnya, serta mengembalikan pada tempat yang sesungguhnya yakni Allah swt.
 - 2) Gerakan Dakwah Tauhid merupakan gerakan yang menyerukan deklarasi tata peradaban kemanusiaan yang berdasar pada nilai-nilai universal wahyu ketuhanan (*Ilahiyyah*) yang mewujudkan Islam sebagai rahmat semesta (*rahmatan lil 'alamin*).
 - 3) Gerakan Dakwah Tauhid adalah gerakan perjuangan berkelanjutan untuk menegakkan nilai kebaikan universal dan meruntuhkan tirani kemungkaran (*amar ma'ruf nahi munkar*).
- b. KAMMI adalah Gerakan Intelektual Profetik
 - 1) Gerakan Intelektual Profetik adalah gerakan yang meletakkan keimanan sebagai ruh atas penjelajahan nalar akal.
 - 2) Gerakan Intelektual Profetik merupakan gerakan yang mengembalikan secara tulus dialektika wacana pada prinsip-prinsip kemanusiaan yang universal.
 - 3) Gerakan Intelektual Profetik adalah gerakan yang mempertemukan nalar akal dan nalar wahyu pada usaha perjuangan perlawanan, pembebasan, pencerahan, dan pemberdayaan manusia secara organik.
 - 4) Gerakan Intelektual Profetik adalah gerakan pemikiran yang menjangkau realitas rakyat dan terlibat dalam penyelesaian masalah rakyat.
- c. KAMMI adalah Gerakan Sosial Independen
 - 1) Gerakan Sosial Independen adalah gerakan kritis yang menyerang sistem peradaban materialistik dan menyerukan peradaban manusia berbasis tauhid.
 - 2) Gerakan Sosial Independen merupakan gerakan kultural yang berdasarkan kesadaran dan kesukarelaan yang berakar pada nurani kerakyatan.
 - 3) Gerakan Sosial Independen merupakan gerakan pembebasan yang tidak memiliki ketergantungan pada hegemoni kekuasaan politik-ekonomi yang membatasi.
 - 4) Gerakan Sosial Independen bertujuan menegakkan nilai sosial politik yang tidak bergantung dengan institusi manapun, termasuk negara, partai maupun lembaga donor.
- d. KAMMI adalah Gerakan Politik Ekstraparlementer
 - 1) Gerakan Politik Ekstraparlementer adalah gerakan perjuangan melawan tirani dan menegakkan demokrasi yang egaliter.
 - 2) Gerakan Politik Ekstraparlementer adalah gerakan sosial kultural dan struktural yang berorientasi pada penguatan rakyat secara sistematis dengan melakukan pemberdayaan institusi-institusi sosial/rakyat dalam mengontrol proses demokrasi formal.
 - 3) Gerakan Ekstraparlementer berarti tidak menginduk pada institusi parlemen maupun pembentuk parlemen (partai politik dan senator). Independensi sikap politik bulat utuh tanpa intervensi partai apapun.
 - 4) Gerakan Ekstraparlementer bergerak di luar parlemen dan partai politik, sebagai representasi rakyat secara independen.

Agar dakwah dapat tumbuh berkelanjutan secara seimbang, tetap berada pada orientasi yang benar, mampu mengelola amanah dan masalah, dan terus memiliki kekuatan untuk mewujudkan tujuan-tujuannya, maka KAMMI menyusun dirinya di atas unsur-unsur sebagai berikut:

- a. *Bina al-qo'idah al-ijtima'iyah* (membangun basis sosial), yaitu membangun lapisan masyarakat yang simpati dan mendukung perjuangan KAMMI yang meliputi masyarakat umum, mahasiswa, organisasi dan lembaga swadaya masyarakat, pers, tokoh, dan lain sebagainya.

- b. *Bina al-qo'idah al-harokiyah* (membangun basis operasional), yaitu membangun lapisan kader KAMMI yang bergerak ditengah-tengah masyarakat untuk merealisasikan dan mengeksekusi tugas-tugas dakwah yang telah digariskan KAMMI.
- c. *Bina al-qo'idah al-fikriyah* (membangun basis konsep), yaitu membangun kader pemimpin yang mampu menjadi teladan masyarakat, memiliki kualifikasi keilmuan yang tinggi sesuai bidangnya, yang menjadi guru bagigerakan, mengislamisasikan ilmu pengetahuan pada bidangnya, dan memelopori penerapan solusi Islam terhadap berbagai segi kehidupan manusia.
- d. *Bina al-qo'idah al-siyasiyah* (membangun basis kebijakan), yaitu membangun kader ideolog, pemimpin gerakan yang menentukan arah gerak dakwah KAMMI, berdasarkan situasi dan kondisi yang berkembang. Keempat unsur tersebut merupakan piramida yang seimbang, harmonis dan kokoh, yang menjamin keberlangsungan gerakan KAMMI.

2. Pembahasan

- a. Konsep Pendidikan Politik yang dilaksanakan KAMMI untuk Menciptakan Kader yang berorientasi pada Profil Muslim Negarawan

Pendidikan politik menurut Ruslan adalah sebagai berikut:

Upaya-upaya yang dicurahkan oleh lembaga-lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal, yang berusaha membentuk dan menumbuhkan kesadaran politik dengan segala tingkatannya, membentuk dan menumbuhkan kemampuan partisipasi politik secara aktif, dalam ikut memecahkan persoalan-persoalan umum masyarakatnya dengan segala bentuk partisipasi yang memungkinkan dan mengantarkan kepada perubahan menuju yang lebih baik. (dalam Handoyo, 2010: 9)

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) adalah salah satu organisasi ekstrakampus yang menjadi sarana pendidikan politik bagi mahasiswa. Karakter organisasi KAMMI adalah sebagai karakter organisasi kader (*harakatut tajnid*) dan organisasi pergerakan (*harakatul 'amal*). Sebagai organisasi kader, KAMMI melakukan pendidikan politik kepada kadernya dalam upaya melahirkan generasi muda yang kelak diharapkan mampu menjadi pemimpin bangsa dengan membawa karakter KAMMI. Sesuai dengan visi KAMMI yaitu sebagai "wadah perjuangan permanen yang akan melahirkan kader-kader pemimpin dalam upaya mewujudkan bangsa dan negara Indonesia yang Islami". Seperti yang dijelaskan oleh Cahyadi Takariawan (2008: 91), bahwa pendidikan politik (*at-tarbiyah as-siyasiyyah*) yang dilaksanakan oleh KAMMI merupakan satu langkah awal yang harus dilaksanakan oleh gerakan Islam kepada para aktivis dakwah, agar mereka memiliki kesiapan untuk terjun dalam kelembagaan politik.

- b. Pelaksanaan pendidikan politik yang dilaksanakan KAMMI untuk menciptakan kader yang berorientasi pada profil muslim negarawan

Menurut Kartono (1989: 19) tujuan dari diadakannya pendidikan politik yaitu, untuk mempersiapkan (1) kader-kader politik yang mampu berfungsi dalam pertarungan politik, (2) untuk mendapatkan penyelesaian politik, (3) sesuai dengan konsep politik yang telah ditetapkan. Tujuan dilaksanakannya pendidikan politik oleh KAMMI adalah untuk menciptakan seorang kader yang memiliki profil sebagai Muslim Negarawan. Seorang muslim negarawan, ia adalah sosok negarawan yang mampu menjadi perekat komponen bangsa pada upaya perbaikan. Dalam buku Risalah Manhaj Kaderisasi KAMMI 1427 menjelaskan bahwa sosok muslim negarawan memiliki lima profil, yaitu memiliki basis ideologi Islam yang mengakar, memiliki basis pengetahuan dan pemikiran yang mapan, idealis dan konsisten, mampu berkontribusi pada pemecahan permasalahan umat dan bangsa, dan mampu menjadi perekat komponen bangsa sebagai upaya perbaikan. Munculnya sosok muslim negarawan dibutuhkan tiga syarat utama, yaitu; (1) mereka yang terlahir dari gerakan Islam yang tertata rapih, (2) semangat keimanan yang kuat, (3) kompetensi yang tajam (Amin Sudarsono: 81). Hal tersebut telah dilaksanakan oleh KAMMI melalui program-programnya sebagai sarana pendidikan politik mahasiswa. Program tersebut adalah sebagai berikut:

1) *Daurah Marhalah*

Daurah marhalah adalah *training* berjenjang yang diselenggarakan untuk merekrut calon anggota baru. *Daurah Marhalah* dibagi menjadi tiga tahap, yaitu: DM1, DM2, dan DM3. Dilaksanakan oleh departemen kaderisasi dan disesuaikan dengan level struktur KAMMI. Sedangkan untuk konsep *daurah* dan materi telah diatur dalam Buku Manhaj Kaderisasi KAMMI yang digunakan sebagai acuan dalam *daurah*.

Seseorang baru dikatakan sebagai kader KAMMI apabila dia telah mengikuti DM1, yang artinya DM1 adalah *daurah* rekrutmen KAMMI. Pada proses selanjutnya dia akan mengikuti madrasah KAMMI 1 (MK1) sebagai proses pembinaan dan sebagai evaluasi perjalanan MK1, kader akan diuji dalam proses sertifikasi

sehingga baru dapat disebut sebagai anggota biasa 1 (AB1). Untuk selanjutnya proses DM1 hingga ia disebut sebagai AB1 dilaksanakan oleh Departemen Kaderisasi KAMMI Komisariat.

Kemudian adalah DM2, adalah tahap selanjutnya dari proses kaderisasi KAMMI setelah seorang kader lulus sertifikasi AB1. Kader yang telah mengikuti DM2 juga akan melalui proses pembinaan di madrasah KAMMI 2 (MK2) dan sertifikasi AB2, sehingga dinyatakan lulus sebagai AB2. Proses pembinaan ini dilaksanakan oleh Departemen Kaderisasi KAMMI Daerah.

Jenjang terakhir adalah DM3. Jenjang terakhir ini diikuti oleh kader KAMMI yang telah lulus sertifikasi AB2. Kader yang telah mengikuti DM3 juga akan melalui proses pembinaan di madrasah KAMMI 3 (MK3) dan sertifikasi AB3, sehingga dinyatakan lulus sebagai AB3. Proses pembinaan ini dilaksanakan oleh Departemen Kaderisasi KAMMI Wilayah.

Materi *daurah marhalah* terdiri atas materi wajib dan materi non wajib. Materi wajib adalah materi yang diberikan sesuai dengan Manhaj Kaderisasi KAMMI, sedangkan materi non wajib adalah materi-materi yang disusun oleh Pengurus komisariat, daerah, atau wilayah dan disesuaikan dengan kebutuhan tiap daerah seperti manajemen organisasi, manajemen aksi, pelatihan Bahasa Inggris, permainan, dan lainnya.

2) *Daurah Siyasi*

Daurah siyasi adalah suplemen dalam pembentukan wawasan dan skill siyasi bagi kader AB1 KAMMI. *Daurah siyasi* ini bertujuan untuk mewujudkan kader yang memahami aspek-aspek pembentukan Negara dan memiliki skill siyasi dalam menyikapi problem-problem sosial politik. Metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi, studi kasus, pemutaran film, diskusi buku.

Daurah siyasi dilaksanakan oleh departemen kaderisasi KAMMI di level komisariat. Secara ideal materi *daurah siyasi* diatur di dalam Manhaj Kaderisasi KAMMI, namun dalam pelaksanaannya, departemen kaderisasi komisariat tidak mutlak merujuk kepada Manhaj Kaderisasi KAMMI. Dengan pertimbangan kondisi kader yang akan diikuti dalam *daurah siyasi*.

3) Aksi KAMMI

Demonstrasi sebagai pernyataan protes yang dikemukakan secara massal, baik protes yang ditujukan kepada seseorang maupun kelompok atau pemerintahan. Sementara aksi massa dimaknai sebagai segala aktivitas yang melibatkan beberapa orang untuk tujuan politik. Aksi massa merupakan bentuk perjuangan aktif dalam rangka merubah kebijakan yang tidak sesuai dengan kehendak massa. Di seluruh dunia, termasuk juga Indonesia, demonstrasi menjadi sebuah cara bagi orang lemah untuk menyampaikan inspirasi kepada pihak yang kuat. Kata "aksi" digunakan oleh KAMMI karena dianggap lebih akrab dan lebih lembut daripada "demonstrasi".

Bagi KAMMI, aksi oleh KAMMI ini tidak hanya dilakukan dengan demonstrasi tetapi juga dalam berbagai bentuk. Seperti yang ada di dalam program kerja departemen kebijakan publik Sleman yaitu, pembentukan lokus diskusi untuk membuat Buku Putih Sleman, pengawalan Perda dan APBD Sleman, Silaturahmi tokoh, dan Audiensi RAPBD Perubahan dengan legislatif.

Aksi massa dikenal dalam berbagai bentuk sesuai dengan target dan sasaran aksi. Aksi massa dibedakan menjadi dua, yaitu aksi statis dan aksi dinamis. Aksi statis adalah aksi massa yang dilakukan pada satu titik tertentu dari awal hingga aksi berakhir. Bentuk aksi ini seperti mimbar bebas dan panggung kesenian. Aksi dinamis adalah aksi yang dimulai dari titik kumpul tertentu lalu berpindah sesuai dengan sasaran aksi, misalnya: rapat akbar, *rally* atau *long march*. Sasaran aksi massa adalah institusi pemerintah atau institusi lain yang relevan dengan tuntutan massa. Waktu pelaksanaan aksi ditentukan berdasarkan basis massa dan sasaran aksi massa. Basis massa KAMMI adalah mahasiswa, maka aksi diselenggarakan pada hari libur mahasiswa atau saat jeda kuliah. Begitu pula dengan sasaran instansi pemerintah Indonesia yang aktif dari hari Senin hingga Jumat dari pukul 08.00 hingga pukul 14.00, maka aksi tidak menarik jika dilaksanakan diluar waktu tersebut.

c. Hambatan dalam pelaksanaan pendidikan politik KAMMI untuk menciptakan kader yang berorientasi pada profil muslim negarawan

Pendidikan politik sangat diharapkan untuk membentuk kekuatan yang dapat melawan dan memberantas segala ketidakadilan, ketidak-harmonisan, dan segala bentuk penindasan. Akan tetapi, bukan perkara gampang dalam pelaksanaan pendidikan politik ini. Banyak hambatan yang dihadapi dalam menyadarkan secara politik warga negara Indonesia seperti yang diungkapkan Kartono (1989: 72-73), sebagai berikut:

- 1) Amat sulit menyadarkan rakyat akan kondisi diri sendiri yang diliputi banyak kesengsaraan dan kemiskinan, sebagai akibat terlalu lamanya hidup dalam ilmu penindasan, penghisapan, dan penjajahan, sehingga mereka menjadi terbiasa hidup dalam serba kekurangan dan ketertinggalan;

- 2) Apatisme politik dan sinisme politik yang cenderung menjadi sikap putus asa itu mengakibatkan rakyat sulit mempercayai usaha-usaha edukatif dan gerakan-gerakan politik. Bahkan banyak di antara massa rakyat yang takut pada kemerdekaan (dirinya).

Hambatan yang dialami oleh KAMMI berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi sumber dana dan terjadinya benturan waktu pelaksanaan kegiatan antara organisasi intrakampus dan ekstrakampus.

Ketersediaan dana sangat penting dalam mendukung kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan pendidikan politik karena apabila dana yang tersedia minim kegiatan tidak dapat berjalan dengan lancar. Sebagai organisasi ekstrakampus, KAMMI tidak mendapatkan asupan dana dari kampus seperti halnya organisasi intrakampus. Sumber dana yang digunakan KAMMI dalam melaksanakan pendidikan politik berasal dari infaq pengurus sebesar dua puluh ribu rupiah untuk BPH dan lima belas ribu rupiah untuk staf setiap satu bulan sekali, pengajuan proposal sponsor, sumbangan dari anggota KAMMI yang telah memiliki penghasilan, dan Badan Usaha Milik KAMMI (BUMK).

Terjadinya benturan waktu pelaksanaan kegiatan antara organisasi intrakampus dan ekstrakampus karena semua kader KAMMI selain menjadi pengurus KAMMI juga memiliki amanah di organisasi intrakampus. Pembinaan di KAMMI tidak hanya sebatas yang dilaksanakan di internal KAMMI, tetapi kader KAMMI yang dibina juga akan dikaryakan di organisasi intrakampus baik di HIMA, DPM, BEM Fakultas maupun BEM Universitas. Pengkaryaan kader KAMMI ini dimaksudkan sebagai upaya pematangan kader dalam berorganisasi. Faktor eksternal yang menjadi hambatan pelaksanaan pendidikan adalah kurangnya kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya pendidikan politik dan sikap pragmatis mahasiswa. Sebagian besar mahasiswa beranggapan bahwa mengikuti pendidikan politik bukan hal yang penting karena tugas utama mahasiswa adalah belajar di ruang kelas. Masih kurangnya pemahaman tentang politik oleh mahasiswa dan sikap pragmatis, membuat politik dianggap sebagai suatu hal yang tidak penting.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang pendidikan politik gerakan mahasiswa dalam menciptakan kader muslim negarawan di KAMMI Daerah Sleman Periode 2013-2014, penulis menarik kesimpulan. Pertama, bahwa konsep pendidikan politik KAMMI merupakan satu langkah awal yang dilaksanakan oleh gerakan Islam kepada para aktivis dakwah, agar mereka memiliki kesiapan untuk terjun dalam kelembagaan politik. Pendidikan politik KAMMI dilatar belakangi dari konsep *syumuliatul Islam* atau konsep kesempurnaan Islam. Pemahaman tentang keintegralan Islam dalam memandang dimensi kehidupan manusia, mulai dari aspek sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Pemahaman ini menjadi penting sebagai dasar pemahaman untuk menyatukan umat. Sebagai organisasi yang akan melahirkan generasi muda yang kelak diharapkan mampu menjadi pemimpin bangsa dengan membawa karakter KAMMI. Pendidikan politik KAMMI bertujuan untuk menciptakan seorang kader yang memiliki profil sebagai Muslim Negarawan, ia adalah sosok negarawan yang mampu menjadi perekat komponen bangsa pada upaya perbaikan. Kedua, program yang dilaksanakan KAMMI sebagai sarana pendidikan politik mahasiswa, yaitu melalui *daurah marhalah*, *daurah siyasi*, dan aksi KAMMI. Bidang yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pendidikan politik adalah bidang kaderisasi dan kebijakan publik. Pelaksanaan pendidikan politik disesuaikan dengan kurikulum yang telah dibuat oleh masing-masing komisariat. Pendidikan politik dilaksanakan KAMMI untuk memberikan bekal kemampuan politik bagi mahasiswa agar kelak setelah lulus sarjana mereka memanfaatkan dan mengembangkan kemampuan tersebut sehingga bisa menjadi warga negara yang mengerti hak dan kewajibannya dalam politik. Dan ketiga, faktor yang menghambat KAMMI dalam pelaksanaan pendidikan politik bagi mahasiswa terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi sumber dana dan terjadinya benturan waktu pelaksanaan kegiatan antara organisasi intrakampus dan ekstrakampus. Faktor eksternal yang menjadi hambatan adalah kurangnya kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya pendidikan politik dan sikap pragmatis mahasiswa.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, ada beberapa saran yang dapat bermanfaat untuk diaplikasikan yaitu untuk pengurus KAMMI Daerah Sleman periode 2013-2014, sebelum pelaksanaan kegiatan pendidikan politik hendaknya melakukan koordinasi dengan semua pengurus secara maksimal agar tidak terjadi bentrokan waktu dengan kegiatan yang diadakan oleh organisasi intrakampus dan ekstrakampus lain serta agar pesertanya bisa optimal. Pengurus KAMMI Daerah Sleman, diharapkan untuk mengembangkan metode penyampaian pendidikan politik yang lebih kreatif dan menarik sehingga lebih banyak mahasiswa yang tertarik untuk mengikuti pendidikan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amin Sudarsono. 2010. *Ijtihad Membangun Basis Gerakan*. Bekasi: Muda Cendekia.
- [2] Andi Rahmat et al. 2007. *Gerakan Perlawanan dari Masjid Kampus*. Yogyakarta: Profetika.
- [2] Cahyadi Takariawan. 2009. *Menyongsong Mihwar Daulah*. Solo: Era Adicitra Intermedia.
- [3] Eko Handoyo et al. 2010. *Etika Politik dan Pembangunan*. Semarang: Widya Karya.
- [4] Imam Cahyono. 2003. *Melacak Akar Ideologi Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia*. Jurnal Pemikiran Islam.
- [5] Kartini Kartono. 1989. *Pendidikan Politik sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung: Mandar Maju.
- [6] Listyarti et al. 2015. *Pengertian Sistem Politik dan Ciri-ciri Sistem politik* <http://www.artikelsiana.com/2015/03/pengertian-sistem-politik-ciri-ciri-sistem-politik.html>
Diakses Pada Hari Senin, 6 Juni 2015 pukul 12.06 WIB.
- [7] Moeleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- [8] Tim Kaderisasi KAMMI. 2011. *Manhaj Kaderisasi KAMMI 1433 H*. Jakarta: PP KAMMI.